



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (sepuluh)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 9 November 2022
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai Pendalaman Tambahan PMN Tunai Tahun Anggaran 2022.
Hadir	:	1. 40 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Saudara Didiek Hartantyo; 3. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Saudara Dwiwana Slamet Riyadi. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada pukul 15.11 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 9 November 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki keterbatasan dalam pembiayaan *cost overrun* dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sehingga membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022 sebesar Rp. 3,2 T (*Tiga Koma Dua Triliun Rupiah*) yang berasal dari cadangan investasi Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas *cost overrun* proyek KCJB tersebut.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China untuk menyusun strategi mitigasi risiko atas pelaksanaan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan memastikan bahwa dengan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 sebesar Rp. 3,2 T (*Tiga Koma Dua Triliun Rupiah*) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat selesai tepat waktu sesuai dengan *timeline* dan *key milestone* yang telah dipaparkan (beroperasi pada Juni 2023).
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyerahkan perubahan studi kelayakan Proyek KCJB sesuai dengan Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No.107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
4. Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan alokasi PMN Tahun 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.52 WIB.

**DIREKTUR UTAMA PT KERETA API
INDONESIA (PERSERO)**

Ttd.

DIDIEK HARTANTYO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-819**

**DIREKTUR UTAMA
PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA**

Ttd.

DWIYANA SLAMET RIYADI